

Performance Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget Management in Medan City Government for Fiscal Year 2019-2023

Nopa Bintang¹, Sonia Purba², Sulastri Panjaitan³, Syaloom Simanjuntak⁴, Heriyati Chrisna⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: noparohmendenabintang@gmail.com; soniapurba562@gmail.com; panjaitansulastri88@gmail.com; syaloomlestari33@gmail.com; heriyati.chrisna@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019 hingga 2023 yang dapat dilihat dari analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2019 hingga 2023 yang didapatkan dari website resmi Pemkot Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Medan dilihat dari analisis pendapatan yang menunjukkan rata-rata 86,2% yang dikategorikan cukup efektif, analisis belanja yang menunjukkan rata-rata 78,5% termasuk kategori kurang efektif, analisis pertumbuhan pendapatan dengan rata-rata 3,7% dikategorikan rendah sekali, analisis pertumbuhan belanja dengan rata-rata 5,8% dikategorikan rendah sekali, rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata 38,3% dikategorikan cukup, rasio efektivitas pajak dengan rata-rata 64,8% dikategorikan cukup efektif, analisis keserasasian belanja dikategorikan dengan rata-rata belanja moda 18,4% belanja operasional 73,7% dan analisis efisiensi belanja dengan rata-rata 78,1% dikategorikan efisien.

Keyword: Analisis Pengelolaan APBD; Pendapatan; Realisasi Anggaran; Kinerja Keuangan Daerah; Efektivitas Pendapatan

ABSTRACT

This study aims to analyze the Performance of Regional Revenue and Expenditure Budget Management in the Medan City Government for the 2019 to 2023 budget years which can be seen from the analysis of revenue performance and expenditure performance analysis. This study is descriptive with a quantitative approach using secondary data, namely from the Medan City Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report from 2019 to 2023 obtained from the official website of the Medan City Government. The results of this study indicate that the financial performance of Medan City is seen from the analysis of income which shows an average of 86.2% which is categorized as quite effective, the analysis of expenditure which shows an average of 78.5% is included in the less effective category, the analysis of income growth with an average of 3.7% is categorized as very low, the analysis of expenditure growth with an average of 5.8% is categorized as very low, the financial independence ratio with an average of 38.3% is categorized as sufficient, the tax effectiveness ratio with an average of 64.8% is categorized as quite effective, the analysis of expenditure harmony is categorized with an average of 18.4% mode expenditure, 73.7% operational expenditure and the analysis of expenditure efficiency with an average of 78.1% is categorized as efficient.

Keyword: Analysis of APBD Management; Revenue; Budget Realization; Regional Financial Performance; Revenue Effectiveness

Corresponding Author:

Heriyati Chrisna,
Universitas Pembangunan Panca Budi,
Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikambing, Medan,
Sumatera Utara 20122, Indonesia
Email: heriyati.chrisna@yahoo.com



1. INTRODUCTION

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dimana APBD menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal.

Dalam pelaksanaan perekonomian daerah, Pemerintah daerah harus memaksimalkan anggaran mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi perekonomian daerah. Ini adalah tanggung jawab publik, karena perekonomian daerah adalah kewenangan yang luas, utuh, dan bulat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dari semua aspek pemerintahan. Dalam rangka pertanggung jawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan harus secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran kuantitatif tentang tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis mencatat pertumbuhan pendapatan dan belanja pada Kota Medan mengalami penurunan yang signifikan. Dimana pada tahun 2019 pertumbuhan pendapatan mencapai 22,9%. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan menunjukkan penurunan yang signifikan hingga menyentuh -38,4%. Begitu pun dengan pertumbuhan belanja pada tahun 2020 yang menyentuh angka hingga -31,2% dikarenakan akibat dari Covid-19. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang rendah sekali karena tidak memenuhi harapan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini menyatakan bahwasannya Pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi pendapatan dan belanja yang ada pada Kota Medan dengan baik.

Dari pernyataan secara keseluruhan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil sebuah judul yaitu “ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019-2023”. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Medan.

2. LITERATURE REVIEW

A. Kinerja Keuangan

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian., 2006:273). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan secara baik dan benar (Hutabarat., 2021:2)

Menurut Mahmudi (2007) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak.

B. Analisis Kinerja Pendapatan

1) Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

$$\text{Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\% \tag{1}$$

Tabel 1. Kemampuan Efektivitas Pendapatan

Kemampuan efektivitas	Persentase
Tidak efektif	< 60%
Kurang efektif	60% - 80%
Cukup efektif	80% - 90%
Efektif	90% - 100%
Sangat efektif	>100%

Sumber: Kepmendagri No. 690. 900. 327 tahun 1996

2) Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis rasio pertumbuhan pendapatan merupakan proses untuk mengetahui kenaikan atau penurunan kinerja pendapatan selama kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\% \tag{2}$$

Tabel 2. Kemampuan Daerah Dan Pola Hubungan

Kemampuan daerah	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

3) Analisis Rasio Keuangan

a) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang di gunakan pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk pembiayaan pembangunan daerah.

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel 3. Skala Interval Derajat Desentralisasi

Skala Interval	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00%	Sangat kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Sedang
30,01 – 40,00%	Cukup
40,01-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat baik

Sumber: Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayain sendiri kegiatan pemerintahan tanpa bantuan dari luar. Rasio ini dapat di hitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asil daerah dengan jumlah otonomi daerah.

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Pinjaman}} \times 100\% \quad (4)$$

Tabel 4. Pola Hubungan Dan Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: (Abdul Halim 2007) didalam (Adhiantoko 2013)

c) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan rasio yang menggambarkan kemam puan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan di bandingkan dengan anggaran yang di tetapkan.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\% \quad (5)$$

Tabel 5. Kriteria Efektivitas Pajak

Persentase	Kriteria
< 60%	Tidak efektif
60% - 80%	Kurang efektif
80% - 90%	Cukup efektif
90% - 100%	Efektif
>100%	Sangat efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006

C. Analisis Kinerja Belanja

1) Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi belanja tahun t}}{\text{Anggaran belanja tahun t}} \times 100\% \quad (6)$$

Tabel 6. Analisis Efektivitas Belanja

Kemampuan efektivitas	Persentase
Tidak efektif	< 60%
Kurang efektif	60% - 80%
Cukup efektif	80% - 90%
Efektif	90% - 100%

Kemampuan efektivitas	Persentase
Sangat efektif	>100%

Sumber : Kepmendagri No. 690. 900. 327 tahun 1996

- 2) Analisis Pertumbuhan Belanja
 Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun.

$$\text{Pertumbuhan belanja tahun } t = \frac{\text{Realisasi tahun } t - \text{Realisasi tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan tahun } (t - 1)} \times 100\% \tag{7}$$

Tabel 7. Kemampuan Daerah Dan Pola Hubungan

Kemampuan daerah	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

- 3) Analisis Keserasian Belanja
 Analisis keserasian belanja merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang di alokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Terdapat dua buah analisis keserasian belanja, yakni:

a) Analisis Total Belanja Modal dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja,
 Rasio Belanja Modal = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$ (8)

- b) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
 Rasio efektivitas pajak daerah merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan di bandingkan dengan anggaran yang di tetapkan.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \tag{9}$$

- 4) Analisis Efisiensi Belanja
 Analisis efisiensi belanja adalah cara untuk mengukur seberapa efisien suatu anggaran belanja digunakan. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute, tetapi relative. Berikut rumus untuk menghitung persentase dari rasio efisiensi belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \tag{10}$$

Tabel 8. Efisiensi Belanja

Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak efisien
=100%	Efisien seimbang
<100%	Efisien

Sumber: Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

D. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas (Purboyo et al., 2021). Tahap-tahap dalam menganalisis Kinerja Keuangan Menurut Djaja (2020:72), ada empat hal yang menjadi perhatian dalam menganalisis laporan keuangan, antara lain:

- 1) Setiap akun dalam laporan keuangan harus diperhatikan. Evaluasi khusus perlu diberikan untuk akun-akun yang memberikan kontribusi signifikan pada aset, liabilitas, ekuitas, penjualan dan laba.
- 2) Perlunya pemahaman kebijakan akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dinilai. Perlu dilakukan pemeriksaan konsistensi penerapan kebijakan-kebijakan akuntansi tersebut.
- 3) Perlunya perhatian khusus atas pencatatan akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang sifatnya tidak terkait dengan operasional normal perusahaan (non-operating), atau transaksi-transaksi yang sifatnya extraordinary dan naturnya tidak mengulang (non-recurring).
- 4) Ada lima hal yang perlu diperhatikan, seperti:
 - a) Kecukupan alokasi pencadangan atas piutang tak tertagih, persediaan lama yang tidak bergerak, dan pencadangan akun lainnya.
 - b) Kebijakan pencatatan investasi (metode cost, equity atau konsolidasi).
 - c) Pengklasifikasian atas biaya-biaya yang telah dibebankan dengan benar, sesuai dengan naturnya.

- d) Perlakuan atas waktu pengakuan pendapatan dan beban telah dilakukan atas waktu pengakuan pendapatan dan beban telah dilakukan sesuai dengan waktu manfaatnya dan konsep matching pendapatan dan beban.
- e) Serta pemisahan pos-pos operating dan non-operating

3. RESEARCH METHOD

Menurut Abubakar (2020:1) metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam (Hardani et al., 2020:260).

4. RESULTS AND DISCUSSION

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengkonfirmasi pentingnya faktor-faktor keuangan, khususnya likuiditas, kebijakan dividen, dan profitabilitas, dalam mempengaruhi pergerakan Harga Saham. Temuan ini memberikan implikasi bagi manajemen perusahaan untuk memperhatikan dan mengelola dengan baik variabel-variabel kunci tersebut agar dapat meningkatkan Harga Saham dan menarik minat investor di pasar modal.

A. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis Pendapatan Kinerja Daerah melibatkan beberapa metode untuk mengelola efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan data APBD dan realisasi APBD.

1) Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

Tabel 9. Anggaran Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	%	Keterangan
2019	6.257.239.035.331	5.518.772.179.306	738.466.856.025	88,1%	Cukup efektif
2020	4.757.852.448.866	3.988.761.485.152	769.090.963.714	83,7%	Cukup efektif
2021	5.208.964.175.119	5.023.080.346.608	185.883.828.511	96,4%	Efektif
2022	6.522.123.770.774	5.449.340.586.722	1.072.783.184.052	83,5%	Cukup efektif
2023	7.296.157.352.009	5.802.580.478.749	1.493.576.873.260	79,5%	Kurang efektif
Rata-rata				86,2%	Cukup efektif

Menurut tabel 9 menunjukkan anggaran yang direncanakan dan di realisasi pendapatan untuk setiap tahun dari 2019 hingga 2023. Persentase efektivitas menunjukkan seberapa baik realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Tahun 2023 menunjukkan efektivitas yang kurang baik dengan persentase 79,5% yang dikategorikan sebagai kurang aktif. Tahun 2019 menunjukkan 88,1% yang dikategorikan cukup efektif. Tahun 2020 menunjukkan efektivitas yang baik dengan 83,7% yang dikategorikan sebagai cukup efektif. Tahun 2021 menunjukkan persentase terbaik dari dengan persentase mencapai 96,4% yang dikategorikan Efektif dan 2022 memiliki persentase efektivitas yang cukup dengan besar persentase 83,5% yang dikategorikan sebagai cukup efektif.

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 10. Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Pendapatan tahun t	Pendapatan tahun t-1	Pertumbuhan pendapatan	Kemampuan Efektivitas
2019	5.518.772.179.306	4.253.618.758.532	22,9%	Rendah sekali
2020	3.988.761.485.152	5.518.772.179.306	- 38,4%	Rendah sekali
2021	5.023.080.346.608	3.988.761.485.152	20,5%	Rendah sekali
2022	5.449.340.586.722	5.023.080.346.608	7,8%	Rendah sekali
2023	5.802.580.478.749	5.449.340.586.722	6,0%	Rendah sekali
Rata-rata			3,7%	Rendah sekali

Menurut tabel 10 menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan pendapatan dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan tahun t dan pendapatan tahun t - 1.

- 3) Analisis Pertumbuhan Pendapatan
 - a) Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 11. Rasio Derajat Desentralisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan asli daerah	Total pendapatan daerah	Rasio derajat desentralisasi	Kemampuan keuangan daerah
2019	1.829.669.955.348	5.518.772.179.306	33,1%	Cukup
2020	1.509.831.081.747	3.988.761.485.152	37,8%	Cukup
2021	1.906.512.189.047	5.023.080.346.608	37,9%	Cukup
2022	2.230.544.495.746	5.449.340.586.722	40,9%	Baik
2023	2.442.782.732.668	5.802.580.478.749	42,1%	Baik
Rata-rata			38,3%	Cukup

- b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 12. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan asli daerah	Bantuan pemerintah pusat	Rasio kemandirian	Pola hubungan
2019	1.829.669.955.348	3.401.878.083.958	53,7 %	Partisipasif
2020	1.509.831.081.747	2.478.930.403.405	60,7 %	Partisipasif
2021	1.906.512.189.047	2.977.574.253.244	64,0%	Partisipasif
2022	2.230.544.495.746	3.150.952.726.119	70,8%	Partisipasif
2023	2.442.782.732.668	3.260.957.621.792	74,9%	Partisipasif
Rata Rata			64,8%	Partisipasif

Dilihat dari tabel 12 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pada kota medan tahun 2019-2023 menunjukkan rasio diatas 50%. Pada tahun 2019 menunjukkan rasio sebesar 53,7%. Pada tahun 2020 sebesar 60,7%. Pada tahun 2021 sebesar 64,0%. Pada tahun 2022 sebesar 70,8%. Pada tahun 2023 menunjukkan rasio sebesar 74,9%.

- c) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 13. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintahan Kota Medan Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target Pajak	Realisasi	Rasio efektivitas	Efektivitas Pajak
2019	1.732.098.260.569	1.472.414.654.505	85,1%	Cukup efektif
2020	1.359.509.068.000	1.195.850.162.642	87,9%	Cukup efektif
2021	1.693.934.904.956	1.495.751.738.668	88,3%	Cukup efektif
2022	2.587.779.709.433	1.961.927.116.116	75,9%	Kurang efektif
2023	3.101.456.231.350	2.108.199.782.497	68,0%	Kurang efektif
Rata-rata			81,0%	Cukup efektif

Dilihat dari tabel 13 rasio efektivitas pajak daerah kota medan pada tahun 2019-2023 menunjukkan angka 81,0% yang dikategorikan cukup efektif. Dari tahun 2019-2021 efektivitas pajak daerah menunjukkan kegiatan yang cukup efektif. Dan pada tahun 2022-2023 menunjukkan kegiatan yang kurang efektif.

B. Analisis Kinerja Belanja

Dengan menggunakan data APBD dan realisasi APBD, dilakukan analisis pendapatan dengan menggunakan analisis:

- 1) Analisis Varians (Selisih) Belanja

Tabel 14. Anggaran Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	%
2019	6.302.963.592.428	5.059.378.661.308	1.243.584.931.120	80,2%
2020	5.254.667.074.399	3.854.742.410.736	1.399.924.663.663	73,2%
2021	5.731.395.062.275	4.499.145.144.311	1.232.249.917.964	78,5%
2022	7.668.720.191.488	6.047.219.172.842	1.621.501.018.646	78,9%
2023	7.844.702.182.572	6.282.441.543.317	1.562.260.639.255	80,1%
Rata-rata				78,1%

Berdasarkan hasil analisis varians belanja pada tabel 14, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 varians belanja dengan kinerja selisih disukai (Favourable Variance). Hal ini dikarenakan tahun 2019-2023 lebih kecil dibandingkan dari yang anggarkannya. Rata-rata anggaran belanja adalah sebesar Rp.6.560.489.620.632 dan realisasi belanja adalah sebesar Rp.5.148.585.386.502 dan selisih sebesar Rp.1.411.904.234.129 dengan kinerja kategori Selisih Disukai (favourable Variance). Diketahui tahun 2019 selisih sebesar Rp. 1.243.584.931.120 dan tahun 2020 selisih sebesar Rp. 1.399.924.663.663 dan tahun 2021 selisih sebesar Rp. 1.232.249.917.964 dan tahun 2022 selisih sebesar Rp. 1.621.501.018.646 serta tahun 2023 selisih sebesar Rp. 1.562.260.639.255.

Dengan menggunakan data APBD dan realisasi APBD, dilakukan analisis pendapatan dengan menggunakan analisis:

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 15. Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Belanja Tahun t	Belanja tahun t-1	Varians	Pertumbuhan Belanja
2019	5.059.378.661.308	4.213.480.509.726	845.898.151.582	16,7%
2020	3.854.742.410.736	5.059.378.661.308	(1.204.636.250.572)	-31,2%
2021	4.499.145.144.311	3.854.742.410.736	644.402.733.575	14,3 %
2022	6.047.219.172.842	4.499.145.144.311	1.548.074.028.531	25,6%
2023	6.282.441.543.317	6.047.219.172.842	235.222.370.475	3,7%
Rata-rata				5,8%

Menurut tabel 15 pada tahun 2019 terjadi peningkatan belanja sebesar 16,7% di banding tahun sebelumnya sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan belanja secara signifikan hingga menyentuh angka -31,2%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian anggaran akibat dampak pandemi COVID-19. Sementara itu pada tahun 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan belanja hingga meyentuh rasio sebesar 14,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 pertumbuhan belanja kembali meningkat sebesar 25,6%. Pada tahun 2023 terjadi kembali penurunan yang signifikan hingga menyentuh persentase 3,7%. Rasio ini menunjukkan penurunan yang dialami kota medan pada tahun 2020 dan 2023. Hal ini dapat meyebabkan masalah ekonomi pada kota medan seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya inflasi dan banyaknya pengangguran di tengah masyarakat. Untuk mencegah hal ini terjadi kembali pemerintah kota medan harus dapat meningkatkan belanja daerah (stimulus fiskal).

3) Analisis Keserasian Belanja

Tabel 16. Keserasian Belanja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023

Tahun	Total belanja	Belanja modal	Belanja operasional	Rasio belanja modal	Rasio belanja operasional
2019	5.059.378.661.308	992.661.245.694	4.066.127.201.868	19,6%	80,4%
2020	3.854.742.410.736	308.278.278.057	2.076.255.354.959	7,9%	53,9%
2021	4.499.145.144.311	574.604.617.139	3.833.501.098.374	12,7%	85,3%
2022	6.047.219.172.842	1.617.535.812.652	4.411.464.936.830	26,7%	72,9%
2023	6.282.441.543.317	1.493.367.508.931	4.788.957.849.977	23,8%	76,2%
Rata-rata				18,4%	73,7%

Berdasarkan pada data yang tersaji pada tabel diatas menunjukkan bahwa besaran belanja operasional dari pemerintah kota medan berada diatas angka Rp. 3,5 triliun pada tahun 2019 sampai 2023. Angka realisasi belanja daerah pemerintah kota medan pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 4.066.127.201.868 awalnya menurun menjadi 53,9% pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp. 2.076.255.354.959 lalu kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 85,3% dengan anggaran sebesar Rp.3.833.501.098.374. Menunjukkan bahwa rata-rata belanja operasional mencapai 73,7%, sementara belanja modal hanya mencapai 18,4% dari total belanja daerah. Penurunan rasio keserasian belanja operasional ditengah peningkatan pada total belanja operasional serta total belanja daerah di kota medan menandakan bahwa total belanja selain operasional di kota medan mengalami peningkatan yang lebih besar sehingga rasio belanja operasional di kota medan menurun sebesar 9,1% pada tahun 2023 dari tahun 2021. Rasio ini mencerminkan bahwa alokasi anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan operasional, seperti pembayaran gaji pegawai, pemeliharaan fasilitas, dan operasional pemerintahan, dibandingkan untuk investasi pembangunan.

4) Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio efisiensi	Kinerja
2019	6.302.963.592.428	5.059.378.661.308	80,2%	Efisien
2020	5.254.667.074.399	3.854.742.410.736	73,2%	Efisien
2021	5.731.395.062.275	4.499.145.144.311	78,5%	Efisien
2022	7.668.720.191.488	6.047.219.172.842	78,9%	Efisien
2023	7.844.702.182.572	6.282.441.543.317	80,1%	Efisien
Rata-rata			78,1%	Efisien

Berdasarkan tabel 17, rasio efisiensi pada tahun 2019 mencapai 80,2% dapat di kategori kan cukup efisien, Rasio efisiensi ini menunjukkan meskipun lebih dari 80% dari anggaran terealisasi, masih ada ruang untuk perbaikan. 80% dianggap cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat efisiensi yang sangat optimal atau mendekati 100%. Pada tahun 2020 , rasio efisiensi sebesar 73,2% , Meskipun rasio efisiensi ini lebih rendah daripada tahun 2019, masih dianggap dalam kategori efisien. Ini karena meskipun ada pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran yang direalisasikan masih berada dalam rentang yang cukup baik, 2021, ada peningkatan sebesar 78,5%, tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020. Sementara di tahun 2022 , rasio efisiensi mencapai 78,9%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. di tahun 2023 , dikatakan cukup efisiensi rasionya mencapai 80,1% , Rasio efisiensi ini sangat dekat dengan tahun

2019, yakni 80,2%, dan meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2020 dan 2021, hasil ini masih dianggap cukup efisien karena kinerja pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Medan pada tahun 2019 hingga 2023 cukup baik, dengan sedikit perbedaan dalam efisiensi dari tahun ke tahun.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kinerja Pendapatan

1) Analisis Varians Pendapatan

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan. Kinerja pendapatan dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal ini dinilai kurang baik.

Berdasarkan rasio anggaran pendapatan daerah kota medan tahun 2019-2023 memiliki rata-rata dari keseluruhan 86,2%. Dengan pendapatan yang menunjukkan 86,2% dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah kota medan belum sepenuhnya mampu memaksimalkan potensi pendapatan yang ada pada kota medan dengan baik.

Hal ini dapat menyebabkan dampak terhadap ekonomi lokal, terganggunya kesejahteraan masyarakat, terjadinya ketimpangan sosial, dan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kota medan. Pemerintah kota medan harus mengadopsi strategi komprehensif yang mencakup diversifikasi pendapatan, efisiensi pengelolaan anggaran, dan penguatan sektor-sektor ekonomi lokal untuk mencegah terjadi penurunan pendapatan daerah.

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tahun 2019-2023 mencatat pertumbuhan dengan rata-rata 3,7%. Menurut Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM (1991) pertumbuhan pendapatan 3,7% dikategorikan pertumbuhan yang rendah sekali karena tidak memenuhi harapan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan pendapatan 3,7% menunjukkan pola hubungan instruktif bahwa pertumbuhan ini mungkin di pengaruhi oleh banyaknya faktor-faktor yang memungkinkan kurangnya investasi, infrastruktur yang terbatas dan daya beli masyarakat.

3) Analisis Rasio Keuangan

a) Rasio Derajat Desentralisasi

Dilihat dari tabel 11 menunjukkan bahwa Rasio derajat desentralisasi daerah menunjukkan trend yang lebih positif dengan peningkatanyang terus bertambah sebesar 2% pertahunnya. Secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai 2023 rasio derajat desentralisasi menunjukkan pesentase sebesar 38,3%. Menurut Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM (1991) rasio derajat desentralisasi dengan angka 38,3% dikategorikan cukup. Hal ini mencerminkan kemampuan Kota Medan dalam mengelolan pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan penyediaan fasilitas yang memadai seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Rasio ini menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Secara keseluruhan kemandirian keuangan daerah pada Kota Medan menyentuh angka diatas 60,0%. Hal ini menunjukkan peran pemerintah daerah kota medan yang cukup baik dalam membiayai kegiatan pemerintahan dari PAD tanpa ketergantungan yang tinggi pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini juga menunjukkan masyarakat banyak berpartisipasi dalam pembangunan daerah seperti membayar pajak dan retribusi daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat mengembangkan potensi daerah secara optimal.

c) Rasio Efektivitas Pajak

Untuk rata-rata rasio efektivitas pajak dengan angka 81,0% menunjukkan bahwasannya pemerintah kota medan mampu mengelola pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Angka ini menunjukkan efisiensi pemerintah kota medan dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat khususnya masyarakat kota medan dalam memenuhi kewajiban pajak.

B. Analisis Kinerja Belanja

1) Analisis Varians Belanja

Maka sejak tahun 2019-2023 masuk kategori Selisih Disukai (Favourable Variance) dikarenakan realisasi belanja tidak melebihi total yang dianggarkan. Oleh karena itu, Ini membuktikan bahwa kota medan telah melakukan penghematan belanja yang tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa kinerja kota medan dikatakan baik karena dapat melakukan proses penghematan. Namun jika selisih anggaran cukup banyak maka akan muncul anggapan bahwa kurang maksimalnya penyerapan dana yang disebabkan oleh program kerja yang belum tercapai atau terealisasi.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan rasio belanja daerah kota medan tahun 2019-2023 memiliki nilai rata - rata dari keseluruhan 5,8% ini menunjukkan penurunan dan ketidak setabilan pengelolaan anggaran belanja daerah kota medan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja, agar pertumbuhan lebih stabil, dan tidak terlalu bergantung pada kondisi eksternal.

3) Analisis Kecerasan Belanja

Rasio belanja modal yang rendah, seperti pada tahun 2020 (hanya 7,9%), menunjukkan kurangnya investasi langsung pada proyek-proyek pembangunan yang bersifat strategis. Padahal, belanja modal sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur dan aset tetap yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ketergantungan yang berlebihan pada belanja operasional dapat menciptakan risiko stagnasi dalam pembangunan jangka panjang. Penurunan signifikan rasio belanja modal pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 (dari 19,6% menjadi 7,9%) kemungkinan besar disebabkan oleh prioritas anggaran yang bergeser selama pandemi COVID-19, di mana dana lebih difokuskan pada kebutuhan operasional darurat. Namun, peningkatan kembali rasio belanja modal pada tahun 2022 hingga 26,7% menunjukkan upaya untuk memperbaiki ketertinggalan dalam pembangunan. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan kembali menjadi 23,8%, yang perlu dicermati lebih lanjut apakah terkait kendala perencanaan atau implementasi proyek. Proporsi belanja operasional yang tinggi dapat memberikan manfaat berupa pemeliharaan layanan publik dasar yang konsisten. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Namun, dominasi belanja operasional ini juga dapat menjadi tantangan ketika proporsi belanja modal yang lebih rendah mengindikasikan kurangnya fokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang.

4) Analisis Efisiensi Belanja

Berdasarkan rasio efisiensi belanja daerah kota medan pada tahun 2019-2023 memiliki rata-rata dari keseluruhan 78,1% pada prinsipnya efisiensi belanja merupakan batas minimal jumlah belanja yang di target kan. Efisiensi Belanja dikatakan baik apabila mampu mengurangi belanja di bawah jumlah yang di anggarkan, maka hal ini di nilai cukup baik, dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa pemerintah kota medan, sudah mampu memaksimalkan potensi belanja yang ada di kota medan dengan mencapai target yang baik.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Medan Tahun Anggaran 2019-2023, Maka dapat di simpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Analisis varians (selisih) pendapatan daerah kota medan selama tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja yang cukup efektif. Analisis pertumbuhan pendapatan kota medan selama tahun 2019-2023 menunjukkan kemampuan daerah yang rendah sekali. Rasio rasio derajat desentralisasi kota medan tahun 2019-2023 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang cukup. Rasio kemandirian keuangan daerah kota medan tahun 2019-2023 kemampuan daerah sedang. Rasio efektivitas pajak kota medan tahun 2019-2023 menunjukkan efektivitas pajak yang cukup efektif.
2. Analisis varians (selisih) belanja daerah kota medan selama tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja yang kurang efektif. Analisis kecerasan belanja modal dan operasional daerah tahun 2019-2023 menunjukkan kurang efektif. Analisis pertumbuhan belanja kota medan selama tahun 2019-2023 menunjukkan kemampuan daerah yang rendah sekali. Analisis efisiensi belanja kota medan tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja yang efisien.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan penulis adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Medan

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan agar kinerja Pemerintah kota Medan terus menunjukkan peningkatan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah dan merealisasikannya secara efektif.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat lebih rinci dalam menjabarkan data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis kinerja pengelolaan APBD serta menambah tahun analisis diatas 5 tahun agar data yang didapatkan lebih akurat dan memperluas ruang lingkup penelitian.

REFERENCES

- Abdul Halim. (2007). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abubakar. (2020). *Metode penelitian: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Adhiantoko. (2013). *Rasio keuangan dan pengelolaan keuangan daerah*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015–2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621.
- Djaja, A. (2020). *Pengelolaan keuangan daerah: Teori dan praktik*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Fadillah, A. Z., & Sudiarti, S. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan tahun anggaran 2017–2021. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(6), 941–956.
- Febriyanti, A., Syifa, A., & Chandra, D. (2022). Analisis kinerja APBD berdasarkan rasio pertumbuhan pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2).

- Gultom, V. (2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Medan: Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). *Universitas HKBP Nommensen Repository*.
- Hardani, et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hutabarat, L. (2021). *Manajemen kinerja keuangan daerah*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8 tentang Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat*.
- Junaidi, L. D., & Anan, M. (2018). Analisis rasio kinerja keuangan pemerintah Kota Medan tahun 2014–2018. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Mahmudi. (2010). Pengukuran rasio keuangan pemerintah daerah: Studi pada Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 4(1), 104–115.
- Marizka, A. (2019). Pengelolaan anggaran dan efisiensi kinerja pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2012–2016. *Jurnal Ekonomi Publik*, 3(4), 87–97.
- Purba, P. Y., & Silitonga, A. A. (2020). Analisis rasio keuangan APBD untuk menilai kinerja keuangan daerah Kota Medan tahun 2016–2020. *Jurnal Ilmiah Keuangan Daerah*.
- Purboyo, et al. (2021). Pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 45–56.
- Silviana, M., Situngkir, A., & Nofianna, S. A. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dengan rasio keuangan (2015–2019). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(1).
- Suci Defeanti. (2020). Indikator kinerja dan analisis keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 3(4), 78–85.
- Tampubolon, S. C. (2018). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD. *Universitas HKBP Nommensen Repository*.
- Tim Libang Depdagri-Fisipol UGM. (1991). *Pola hubungan dan kemandirian keuangan daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wulandari, A. (2001). Kemampuan keuangan daerah: Studi kasus Kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 5(2), 17–33.
- Yulia, R., & Simanjuntak, D. (2023). Analisis pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Medan tahun 2017–2021. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 23–37.